

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memenuhi amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Untuk menunaikan kewajiban Konstitusi Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 27 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 pada pasal 3 ayat (1) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten soppeng harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Soppeng selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2017.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng ini adalah merupakan bahan Penyusunan LKPj Kepala

daerah Tahun 2017, dimana didalamnya tertuang Kebijakan Pemerintah daerah melalui Visi-Misi, Strategi dan arah Kebijakan serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Urusan Wajib yang dilaksanakan.

## **B. DASAR HUKUM**

Dalam Melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada :

- Ketetapan MPR RI No. 11/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017;
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

**C. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT**

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan tugas Perbantuan.
- Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. VISI DAN MISI**

**VISI : “MENJADI SKPD PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG”**

**MISI : 1. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang gratis, profesional, dan cepat (M1)**

#### **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH (SESUAI RPJMD)**

Adapun arah Kebijakan umum daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu Kepada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 yang berisikan Visi dan Misi Kabupaten :

- **VISI** : Pemerintah Yang Melayani dan Lebih Baik.
- **MISI** :
  1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani
  2. Mewujudkan Pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.
  3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih dalam pelayanan public.
  4. Menata kepariwisataan dan system transportasi yang mulus dan nyaman.
  5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
  6. Menjamin ketersediaan system pelayanan kesehatan unggul dan murah.
  7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
  8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

➤ **KEBIJAKAN**

Adapun Kebijakan umum Pemerintah Daerah yang diprioritaskan pada tahun 2017 adalah:

1. Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit ikan.
2. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bendung, bendungan dan jaringan irigasi.
3. Perbaikan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun serta dukungan pendidikan gratis dan beasiswa.
4. Perbaikan akurasi data penduduk lahir/meninggal dan penduduk migrasi kedalam/keluar serta penyelenggaraan pelayanan KTP di Kantor Dukcapil Kabupaten dan Kantor Kecamatan.
5. Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk).
6. Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil.
7. Penataan struktur kelembagaan dan pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja.
8. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat.
9. Pelayanan kesehatan langsung/mobile kesehatan terutama untuk warga miskin.
10. Penyelenggaraan layanan rumah sakit.
11. Revitalisasi spirit kegotong-royongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi mental)
12. Penanggulangan kemiskinan multidimensi.

➤ **PROGRAM**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng dialokasikan melalui 5 (lima) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk 25 Kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.772.818.450,- dan hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.2.663.769.484,- atau 96,07 persen.

Adapun 5 (Lima) Program tersebut sebagai berikut :

1. Program pelayanan perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan profesionalisme aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program penataan administrasi kependudukan

**BAB III****KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng tidak mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

**B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH****1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng yang dijabarkan dalam DPA tahun 2017 disusun dan dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kab.Soppeng No.01 tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka Efisiensi Belanja Penggunaan Anggaran Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

**2. Target dan Realisasi Belanja**

Target Belanja Langsung sesuai DPA Perubahan T.A. 2017 adalah sebesar Rp.2.772.818.450,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.2.663.769.484,- atau 96,07%

**3. Permasalahan dan Solusinya**

Permasalahan yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin adalah sebagai berikut :

- Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

- Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- Pengesahan Dokumen Perubahan Anggaran yang sangat lamban sehingga waktu realisasi anggaran sangat mepet. Masih belum optimalnya kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja aparat.

Solusi permasalahannya, adalah

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber dana.
- Diperlukan kesadaran bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja secara profesional dan bertanggungjawab
- Perlunya Mengikuti bimtek dalam meningkatkan pengetahuan perundang-undangan.



**BAB IV****PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH****A. PRIORITAS URUSAN WAJIB DILAKSANAKAN****1. Program dan Kegiatan****1.1 Program Pelayanan Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / OPS
- Penyediaan Jasa Layanan Kebersihan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah serta kedinasan lainnya.
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

**1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeuler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OPS
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

**1.3 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

#### **1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

#### **1.5 Program Penataan Administrasi Kependudukan**

- Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
- Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan
- Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil
- Pengembangan data base kependudukan
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan pendaftaran penduduk
- Penerapan system manajemen pelayanan administrasi kependudukan berstandar ISO

## **2. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan**

### **1.1 Hasil yang dicapai**

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut :

#### **a. Program Pelayanan Perkantoran**

Terlaksananya Program Pelayanan Perkantoran dengan 8 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 820.050.450,- dapat terealisasi sebesar Rp.790.887.247,- atau 96.44 persen, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik, dengan alokasi anggaran Rp.98.010.000,- dan terealisasi Rp.85.371.297,- atau 87.10%. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran Rp.10.350.000,- dan terealisasi Rp.10.184.500,- atau 98.40%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya surat kelengkapan Kendaraan Dinas dan Asuransi Kendaraan, 2 unit Roda 4 dan 4 unit Roda 2 selama 12 Bulan.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp.7.892.000,- dan terealisasi Rp.7.695.000,- atau 97.50%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kebersihan gedung kantor dan halaman selama 12 bulan.
4. Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan, dengan alokasi anggaran Rp.1.326.000,- dan terealisasi Rp.1.310.000,- atau 98.79%. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya penerangan lampu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memadai selama 12 Bulan.
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran Rp.4.561.000,- dan terealisasi Rp.4.015.000,- atau 88.03%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan terealisasi Rp.9.790.000,- atau 97.90%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya surat kabar/majalah selama 12 bulan
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan alokasi anggaran Rp.398.250.000,- dan terealisasi Rp.383.374.000,- atau 96.26%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama 1 Tahun dimana SPD dalam daerah sebanyak 271 kali dan luar daerah sebanyak 198 kali.

8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp.289.661.450,- dan terealisasi Rp.289.147.450,- atau 99.82%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya alat tulis kantor, pencetakan dan penggandaan serta makanan dan minuman selama 12 bulan.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 582.027.250,- dapat terealisasikan sebesar Rp.557.369.148,- atau 95.76 persen, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran Rp.100.850.000,- dan terealisasi Rp.99.560.000,- atau 98.72%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC 2PK 6 unit, TV LED 40 inch 1 unit, Banner Stand 8 buah, Display running text 2 buah, kompor gas 1 buah, rice cooker 1 buah, jam digital 2 buah, CCTV 1 paket, Kamera CCTV 2 titik, LCD proyektor 1 unit dan layar proyektor 1 buah.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran Rp.98.585.000,- dan terealisasi Rp.98.585.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan gedung kantor berupa barang non asset tetap sebanyak 8 unit, berupa Laptop 5 unit, printer canon 1 unit, printer Epson 1 unit, pengadaan website 1 paket.
3. Pengadaan Meubeler, dengan alokasi anggaran Rp.162.819.500,- dan terealisasi Rp.154.505.000,- atau 94.89%. Hasil yang di capai adalah tersedianya pengadaan mebeleur sebanyak 63 unit berupa Meja Layanan 1 paket, kursi rapat 49 buah, lemari arsip 2 pintu kaca 2 buah, lemari arsip 2 pintu kayu 2 buah, rak server 1 buah, kursi tunggu 3 dudukan 3 buah, kursi tamu 1 unit, kursi tunggu (sofa) 4 buah.
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran Rp.90.750.750,- dan terealisasi Rp.89.048.400,- atau 98.12%. Hasil yang dicapai

adalah terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor yaitu berupa Anti Rayap dan renovasi WC.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OPS, dengan alokasi anggaran Rp.110.712.000,- dan terealisasi Rp.97.760.748,- atau 88.30%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya kendaraan dinas/Operasional yang baik, berupa service reparasi, penggantian suku cadang variasi 2 unit roda 4 dan 4 unit roda 2 .
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran Rp.18.310.000,- dan terealisasi Rp.17.910.000,- atau 97.82%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya komputer PC, Laptop, Printer dan AC selama 1 tahun.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur dengan 2 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.87.261.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.82.576.541,- atau 94.63 persen, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, dengan alokasi anggaran Rp.12.500.000,- dan terealisasi Rp.12.500.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Pelatihan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran Rp.74.761.000,- dan terealisasi Rp.70.076.541,- atau 93.73%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan meningkatkan Kemampuan yang memadai sebanyak 7 orang.

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.40.688.000,-

dapat terealisasi Rp.37.250.000,- atau 91.55 persen, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, dengan alokasi anggaran Rp.14.250.000,- dan terealisasi Rp.14.249.750,- atau 100%. Hasil yang dicapai tersusunnya Laporan perencanaan dan laporan capaian kinerja berupa Rancangan Renstra, Renja, LPPD, LKPj, laporan Kinerja, RKA/DPA, RKA/DPA Perubahan, Laporan Tepra dan Laporan Evaluasi RKPD sebanyak 8 Dokumen laporan.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran Rp.9.525.000,- dan terealisasi Rp.9.487.500,- atau 99.61%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelaporan keuangan dalam bentuk LRA, Neraca, CALK dan LO sebanyak 4 Laporan.

**e. Program Penataan administrasi kependudukan**

Terlaksananya Program penataan administrasi kependudukan dengan 7 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 1.259.704.750,- dapat terealisasi Rp.1.209.199.298,- atau 95.99 persen, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan), dengan alokasi anggaran Rp.235.575.000,- dan terealisasi Rp.207.858.000,- atau 88.23%. Hasil yang dicapai adalah software dan hardware computer berfungsi dengan baik
2. Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan, dengan alokasi anggaran Rp.20.985.000,- dan terealisasi Rp.16.730.000,- atau 79.72%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya profil Kependudukan sebanyak 1 dokumen.

3. Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil , dengan alokasi anggaran Rp.376.380.000,- dan terealisasi Rp.372.112.948,- atau 98.87%. Hasil yang dicapai adalah akta capil yang diterbitkan sebanyak 6,600 akta.
4. Pengembangan data base kependudukan, dengan alokasi anggaran Rp.527.106.000,- dan terealisasi Rp. 512.969.600,- atau 97.32%. Hasil yang dicapai adalah KK yang diterbitkan sebanyak 19.000 dokumen.
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dengan alokasi anggaran Rp.28.297.500,-, dan terealisasi Rp. 28.297.500,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya survey kepuasan masyarakat sesuai standar pelayanan public sebanyak 1 dokumen.
6. Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan pendaftaran penduduk, dengan alokasi anggaran Rp.56.080.000,- dan terealisasi Rp. 55.950.000,- atau 99.77%. Hasil yang dicapai adalah 1.690 KTP.
7. Penerapan system manajemen pelayanan administrasi kependudukan berstandar ISO, dengan alokasi anggaran Rp.15.281.250,- dan terealisasi Rp. 15.281.250,- atau 100%. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kompetensi aparatur sebanyak 65 orang.

## 1.2. Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan

Dampak yang dirasakan setelah pelaksanaan Kegiatan ;

- Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran.
- Meningkatnya wawasan, kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Operasional Pengelolaan Keuangan Lebih lancar.
- Akses Informasi lebih mudah

## 1.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program /Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>A. Belanja Tidak Langsung</b>		<b>2,242,117,812.00</b>	<b>1,938,301,248.00</b>	<b>86.45</b>
<b>B. Belanja Langsung</b>		<b>2,772,818,450.00</b>	<b>2,663,769,484.00</b>	<b>96.07</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,010,000.00	85,371,297.00	<b>87.10</b>
2	· Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,350,000.00	10,184,500.00	<b>98.40</b>
3	· Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	7,892,000.00	7,695,000.00	<b>97.50</b>
4	· Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,326,000.00	1,310,000.00	<b>98.79</b>
5	· Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,561,000.00	4,015,000.00	<b>88.03</b>
6	· Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	9,790,000.00	<b>97.90</b>
7	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	398,250,000.00	383,374,000.00	<b>96.26</b>
8	· Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	289,661,450.00	289,147,450.00	<b>99.82</b>
<b>Program Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
9	· Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,850,000.00	99,560,000.00	<b>98.72</b>
10	· Pengadaan peralatan gedung kantor	98,585,000.00	98,585,000.00	<b>100.00</b>
11	· Pengadaan mebeulair	162,819,500.00	154,505,000.00	<b>94.89</b>
12	· Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	90,750,750.00	89,048,400.00	<b>98.12</b>
13	· Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	110,712,000.00	97,760,748.00	<b>88.30</b>
14	· Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18,310,000.00	17,910,000.00	<b>97.82</b>
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>				
15	· Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12,500,000.00	12,500,000.00	<b>100.00</b>
16	· Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	74,761,000.00	70,076,541.00	<b>93.73</b>
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				
17	· Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	14,250,000.00	14,249,750.00	<b>100.00</b>



18	.	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	9,525,000.00	9,487,500.00	<b>99.61</b>
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>					
19	.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	235,575,000.00	207,858,000.00	<b>88.23</b>
20	.	Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	20,985,000.00	16,730,000.00	<b>79.72</b>
21	.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	376,380,000.00	372,112,948.00	<b>98.87</b>
22	.	Pengembangan data base kependudukan	527,106,000.00	512,969,600.00	<b>97.32</b>
23	.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28,297,500.00	28,297,500.00	<b>100.00</b>
24	.	Peningkatan pelayanan public pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56,080,000.00	55,950,000.00	<b>99.77</b>
25	.	Penerapan Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan berstandar ISO	15,281,250.00	15,281,250.00	<b>100.00</b>

**BAB V****PENUTUP****KESIMPULAN**

Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng ini dibuat sebagai bentuk Akuntabilitas Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Tahun anggaran 2017 yang disusun untuk menindaklanjuti dan memenuhi amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 .

Demikian Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah daerah yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

Watansoppeng, 16 Januari 2018  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG

**Drs.H.ANDI MUHAMMAD ILHAM, MM**

Nip.196209090199003 1 012

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kebijakan Pemerintah Pusat .....	3
Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah .....	4
A. Visi dan Misi .....	4
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	4
Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah .....	7
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	7
B. Pengelolaan Belanja Daerah .....	7
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	9
1. Program dan Kegiatan .....	7
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	11
Bab V Penutup .....	19
Kesimpulan .....	19

Lampiran :

1. Realisasi Target dan Belanja Tahun 2017

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan.

Laporan ini menjelaskan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana didalamnya dijelaskan Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran pada Instansi Pemerintahan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berikut manfaat atau dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Watansoppeng, 16 Januari 2018  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG

**Drs.H.ANDI MUHAMMAD ILHAM, MM**  
Nip.196209090199003 1 012

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**Jalan Salotungo Telp. (0484) 21507 Watan Soppeng 90812 Fax 0494 21507**

**REALISASI TARGET DAN REALISASI BELANJA**

**DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KAB. SOPPENG TAHUN 2016**

No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TARGET	REALISASI DANA (Rp)	%
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>565.502.169,00</b>	<b>0,99</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi listrik, telepon dan air	Bulan	12	80.886.920,00	97,54%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK	Unit	11	2.122.140,00	58,14%
		Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan gedung	Bulan	12	8.430.000,00	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya Penerangan bangunan gedung kantor	Jenis	3	2.000.000,00	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan/wawasan aparat	Tahun	1	15.000.000,00	100%
		Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Lancarnya kordinasi dan konsultasi dalam tugas kedinasan	Bulan	12	204.085.659,00	99,84%
		Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Tersedianya ATK,Honor,Cetak, Jilid, dan makan minum kantor	Tahun	1	252.977.450,00	99,03%
2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>531.969.000,00</b>	<b>99,97%</b>
			Terpenuhinya perlengkapan				

		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kantor yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat	Tahun	1	105.394.000,00	100%
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	Jenis	4	46.244.000,00	99,80%
		Pengadaan mebeulair	Terpenuhinya mebeulair kantor	Jenis	3	120.615.000,00	100%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terwujudnya kenyamanan kerja dilingkungan kantor	Tahun	1	13.200.000,00	100%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Terwujudnya kelancaran tugas dan kerja aparat	Unit	11	44.672.000,00	99,91%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	4	6.000.000,00	100%
		Rehabilitasi sedang/berat halaman, taman, pagar, tempat parkir	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jenis	1	195.844.000,00	99,99%
3	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					<b>28.600.000,00</b>	<b>90,51%</b>
		Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Peningkatan kapasitas SDM aparat dalam melaksanakan tugas tugas kedinasan	Orang	7	28.600.000,00	90,51%
4	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					<b>16.822.500,00</b>	<b>99,99%</b>
		Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Terwujudnya peningktan sistem laporan kinerja SKPD	Dokumen	8	11.935.000,00	100%
		Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Peningkatan pelaksanaan capaian kinerja dalam hal penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	4.887.500,00	100%

Mengetahui;  
KEPALA DINAS KEPEDUDUKAN, CAPIL,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SOPPENG

						<b>Drs. H. ANDI MUHAMMAD ILHAM, MM</b>	
						NIP. 19620909 199003 1 012	





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jalan Salotungo Telp. (0484) 21507 Watan Soppeng 90812 Fax 0494 21507

**REALISASI TARGET DAN REALISASI BELANJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SOPPENG TAHUN 2017**

No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TARGET	REALISASI DANA (Rp)	%
1	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>					<b>790.887.247,00</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi listrik, telepon dan air	Bulan	12	85.371.297,00	87,1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK	Unit	11	10.184.500,00	98,4
		Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan gedung	Bulan	12	7.695.000,00	97,5
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya Penerangan bangunan gedung kantor	Jenis	2	1.310.000,00	98,79
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dengan kondisi baik	Tahun	1	4.015.000,00	88,03
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan/ wawasan aparat	Tahun	1	9.790.000,00	97,9
		Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Lancarnya kordinasi dan konsultasi dalam tugas kedinasan	Bulan	12	383.374.000,00	96,26
		Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Tersedianya ATK,Honor,Cetak, Jilid, dan makan minum kantor	Tahun	1	289.147.450,00	99,82
2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>557.369.148,00</b>	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor yang mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat	Jenis	5	99.560.000,00	98,72

		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	Jenis	3	98.585.000,00	100
		Pengadaan mebeulair	Terpenuhinya mebeulair kantor	Jenis	3	154.505.000,00	94,89
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terwujudnya kenyamanan kerja dilingkungan kantor	Tahun	1	89.048.400,00	98,12
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Terwujudnya kelancaran tugas dan kerja aparat	Unit	6	97.760.748,00	88,3
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	4	17.910.000,00	97,82
3	<b>Program peningkatan profesionalisme aparatur</b>					<b>82.576.541,00</b>	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Orang	50	12.500.000,00	100
		Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Peningkatan kapasitas SDM aparat dalam melaksanakan tugas tugas kedinasan	Orang	7	70.076.541,00	93,73
4	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					<b>23.737.250,00</b>	
		Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Terwujudnya peningktan sistem laporan kinerja SKPD	Dokumen	7	14.249.750,00	100
		Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Peningkatan pelaksanaan capaian kinerja dalam hal penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	9.487.500,00	99,61

Mengetahui;  
KEPALA DINAS KEPEDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG

**Drs. H. ANDI MUHAMMAD ILHAM, MM**  
NIP. 19620909 199003 1 012